

**Research Article**

**COVID-19 Countermeasure Policy in the Province of Jakarta Capital City**

**Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta**

Irma Yunita<sup>1</sup>, Anhari Achadi<sup>2</sup>, Maman Saputra<sup>3</sup>, Rangga Kusumo<sup>4</sup>, Nurul Hasani<sup>5</sup>, Farhannuddin Rusdi<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup>Faculty of Public Health Universitas Indonesia Depok

<sup>4</sup>Faculty of Social Science and Political Science Universitas Indonesia Depok

<sup>5</sup>Faculty of Law, Social Sciences, and Political Science Universitas Terbuka Jakarta

<sup>6</sup>Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta

**ABSTRACT**

*Jakarta is the highest province of positive COVID-19 cases nationally and the epicenter region in Indonesia. This study aims to analyze the development of the number of cases and COVID-19 countermeasure policy in the Province of Jakarta Capital City. This study uses a qualitative method with in-depth interviews and document review. Primary data was collected from selected informants, namely the Head of Jakarta Health Office and Assistant to the Provincial Secretary for Governmental. Secondary data is taken from legal and policy documents, reports, websites, and press releases. The fluctuation of COVID-19 cases in Jakarta depends on the capacity of the examining laboratory and the capacity of contact tracing. Until April 30, 2020, The Provincial Government of Jakarta Capital City has made 74 policies. They made COVID-19 as a serious policy agenda and collaborates with the whole of government, privates, professional / community / religious organizations, and society. Situational factors are the most influential factors in the policymaking process. The Provincial Government of Jakarta Capital City concerns early since the Wuhan Pneumonia case with the epidemiological surveillance system of the Health Office, which has been running regularly monitoring infectious diseases from the community health center level. Policy formulation is based on research and scientific studies. Monitoring and evaluation are carried out both formatively and summatively to address problems and obstacles in policy implementation. The Provincial Government of Jakarta Capital City took the early response to collaborates with the whole of government, privates, and society in policymaking and implementation.*

**Keywords:** Countermeasure, COVID-19, Jakarta, policy, provincial government

**ABSTRAK**

DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi kasus positif secara nasional dan menjadi wilayah episentrum COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah kasus dan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sumber data primer dengan metode wawancara mendalam dan data sekunder dengan telaah dokumen. Data primer digali dari informan terpilih yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen hukum dan kebijakan, laporan, website dan pers rilis tentang COVID-19 di DKI Jakarta. Hasil penelitian menemukan bahwa fluktuasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta tergantung pada kapasitas laboratorium pemeriksa, kemampuan kecepatan laboratorium mengeluarkan hasil dan kapasitas tracing kontak di lapangan termasuk juga ketersediaan dari reagen maupun alat-alat penunjang lainnya. Hingga 30 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat 74 kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kewaspadaan terhadap COVID-19 sebagai agenda kebijakan yang serius dan berkolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, swasta, organisasi profesi/masyarakat/keagamaan, dan seluruh komponen masyarakat. Faktor situasional adalah faktor yang paling berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, disamping faktor lain yaitu struktural, sosial budaya, dan internasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan kewaspadaan kasus Pneumonia Wuhan sejak dini melalui sistem surveilens epidemiologi Dinas Kesehatan yang telah berjalan reguler memantau penyakit menular dari tingkat puskesmas. Formulasi kebijakan didasari oleh penelitian dan hasil kajian ilmiah. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara formatif maupun sumatif untuk menjawab permasalahan dan hambatan dalam implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** COVID-19, Jakarta, kebijakan, pemerintah provinsi, penanggulangan

*Correspondence: Irma Yunita. Faculty of Public Health Universitas Indonesia Depok, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, East Java 12345 Tel. +6287796506898 Email: Irmaoemardi@gmail.com*

DOI: [http://dx.doi.org/10.21776/Article\\_in\\_Press](http://dx.doi.org/10.21776/Article_in_Press)